BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dispenda)

Proklamator bangsa kita menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghormati jasa-jasa pahlawannya. Memang ini dalam skala kenegaraan tapi tentu pemahamannya dapat ditarik pada skala-skala lebih kecil seperti kedinasan. Kalimat tersebut pendek namun memiliki makna luar biasa bila dapat dihadirkan dalam skala yang terkecil sekalipun. Sebagai pelaku sejarah, tidak jarang kita melihat antar pelaku sejarah melakukan koreksi terhadap pelaku sejarah lain, makanya tidak heran didalam kenegaraan kita sering menemui pemelintiran sejarah.

Hal ini mengilhami bahwa kita harus memahami sejarah, menghargai dan menguasai sebagai modal kedepan dalam menentukan arah pergerakan Dinas Pendapatan. Merujuk hal tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk senantiasa membangun komitmen kedinasan jajaran aparaturnya. Komitmen kedinasan adalah suatu keniscayaan karena kalau tidak dibangun menjadi satu, jangankan yang asal muasalnya sangat heterogen yang homogen juga bisa memiliki persepsi berbeda, visi berbeda, opininya berbeda.Apalagi aparatur Dinas Pendapatan

berasal dari berbagai organiasi perangkat daerah (OPD). Oleh karenanya penting komitmen kedinasan menjadi satu masa lalu yang dilalui pada OPD lain sebagai referensi penguat, sebagai referensi pembanding, tapi ketika menjadi bagian aparatur Dispenda harus memiliki esprit de corps kuat terhadap organisasi.

Membangun komitmen kedinasan melalui pengungkapan sejarah dipandang langkah tepat karena sejarah bisa menjadi modal dalam mengilhami serta inspirasi kedepan. Dinas Pendapatan telah menepuh suatu perjalanan panjang tanpa terhindar dari pasang surut, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya wacana penggabungan Dinas Pendapatan dan Biro Keuangan, pertimbangan sejarah panjang bahwa tidak mudah membangun Dinas Pendapatan yang memiliki asal muasal dari Biro Keuangan Daerah. Ini bagian dari satu pertimbangan selain pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi sejarah ini telah membuktikan bahwa pengalaman itu adalah guru dalam kehidupan kita. Perkembangan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Djawatan Perpadjakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DT I Jawa Barat. Dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.

Sebelum itu dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 60/PO/V/OM/SK/71 sudah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administratur bidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah satu rumpun, ketika proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri.

Tugas pokok Jawatan adalah menyelenggarakan tugas-tugas dan kewenangan–kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bidang Perpajakan Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta garis-garis kebijaksanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Cq. Gubernur. Pada awalnya susunan organisasi jawatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu kepala jawatan dan unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala seksi. Sebagai Kepala Jawatan yang pertama yaitu Drs. H. MAHBUB MESRIE dengan periode jabatan dari tahun 1972 - 1976. Sebagai unsur pelaksana adalah kantor-kantor perwakilan jawatan ditingkat Inspektorat Wilayah yang terdiri dari:

1. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Banten disebut wilayah I yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
2. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Bogor disebut wilayah II yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
3. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Cirebon disebut wilayah III yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
4. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Purwakarta disebut wilayah IV yang terdiri dari kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
5. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Priangan disebut wilayah V yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.

1.1.1 Arti Lambang Jawa Barat

Gambar 1.1 Lambang Jawa Barat



Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (2013)

1. Arti Lambang Jawa Barat KUJANG
    - Gambar pokok
    - Sebuah alat serba guna yang sangat di kenal di hampir di setiap rumah tangga sunda
    - Jika perlu di gunakan sebagai alat penjaga diri
    - Lima lubang melambangkan lima dasar pokok negara "pancasila"
        1. Ketuhanan Yang Maha Esa
        2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap
        3. Persatuan Indonesia
        4. Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan
        5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. PADI
    - Bahan makanan pokok di Jawa Barat serta sekalian melambangkan pangan
    - Sejumlah padi 17 menyatakan hari ke-17 dari bulan Proklamasi
3. KAPAS
    - Melambangkan sandang
    - Jumlah kapas 8 menyatakan bulan ke-8 dari bulan Proklamasi. 2/3 padi dan kapas pada dasar hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa barat

4. GUNUNG

   Bagian terbesar Jawa Barat terdiri dari daerah pegunungan

5. SUNGAI DAN TERUSAN

   Melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di daerah Jawa Barat.

6. SAWAH, PERKEBUNAN

   - Jumlah sawah yang tidak sedikit, tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat
   - Perkebunan
   - di bagian Utara dan Selatan

7. DAM, SALURAN AIR DAN BENDUNGAN

   Usaha dan pekerjaan di bidang irigasi merupakan pekerjaan yang mendapat perhatian pokok, mengingat sifat agraris daerah jawa Barat

8. "GEMAH RIPAH REPEH RAPIH"

   Sebuah pepatah lama di kalangan sunda yang menyatakan bahwa yang padat yang hidup rukun dan damai.

1.1.2 Visi dan Misi Dinas pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

1.1.1.2 Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik.

1.1.1.3 Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

- Meningkatkan Pendapatan Daerah
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat
- Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
- Menjalin jejaring kerja (*Networking*) dan koordinasi secara sinergis di Bidang Pendapatan Daerah.

1.2 Sejarah Divisi Humas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Bandung baru berdiri lagi sekitar dua tahun ini, karena pada masa sebelum pemerintahan presiden Abdurahman Wahid Humas di pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Bandung digabungkan dengan protokoler Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Namun setelah masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, Departemen keprotokoleran dihapus atau ditiadakan sehingga secara otomatis Humas pun tidak ada. Namun setelah masa pemerintahan Abdurahman Wahid berakhir , akhirnya Humas di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Bandung mulai dirintis kembali dan akhirnya resmi berdiri sendiri di divisi Setda (sekretaris daerah) yaitu dari akhir 2007 sampai sekarang sekitar kurang lebih dua tahunan.

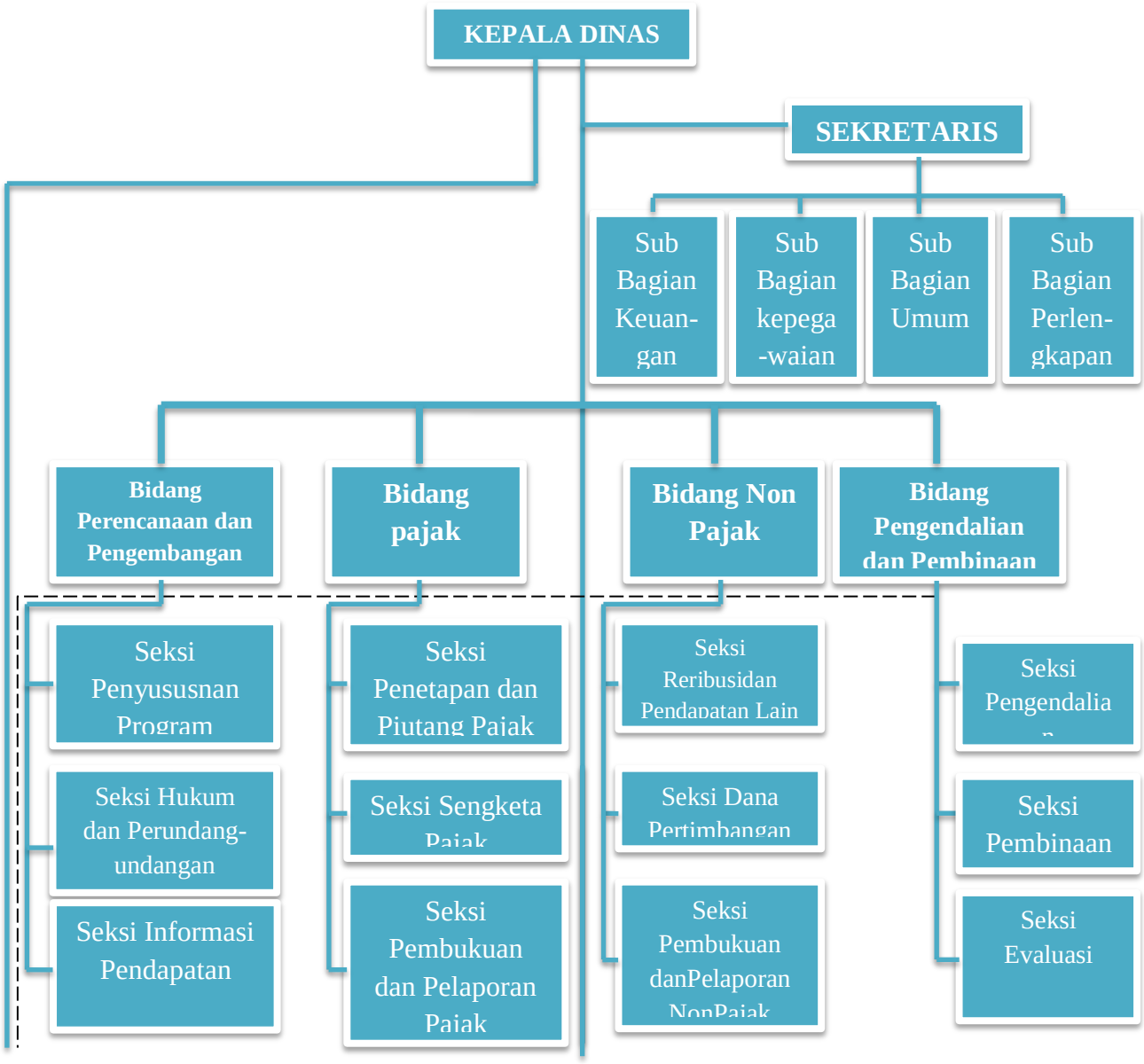
Tujuan Humas dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang pembangunan adalah :

1. Meningkatkan penyampaian berbagai informasi kabupaten bandung yang akurat dan mutakhir pada masyarakat kabupaten bandung.
2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas informasi menuju pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

1.3 Struktur Perusahaan/Instansi

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber : Divisi Humas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2012

1.4 Struktur Divisi atau Humas

Bagian Humas di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat penghubung antara Dinas Pendapatan Daerah provinsi Jabar dan masyarakat. Hal ini bisa difahami karena Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dari masyarakat itu sendiri. Maka suatu kewajaran apabila suatu Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat harus tetap terhubung dengan masyarakat.Humas menjadi palang pintu menjadi hubungan yang harmonis antara Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat.

Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan keterkaitan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti. Humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara organisasi dan masyarakat.

Tujuan:

1. Menciptakan dan menjaga citra positif perusahaan
2. Mengkomunikasikan pelayanan/produk layanan
3. Mencegah dan mengatasi masalah
4. Mengatasi kesalah pahaman dan prasangka
5. Mengantisipasi terjadinya reaksi negative atau kontra produktif dari public terkait dengan kebijakan perusahaan
6. Menciptakan opini public dan menarik perhatian public

7. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi setiap pelaksanaan kebijakan perusahaan

Fungsi humas ialah:

1. pembinaaan hubungan antar lembaga dan masyarakat.
2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan untuk masyarakat.
3. pembinaan hubungan kerjasama antara media dan pembinaan jabatan/pranata kehumasan.
4. Memberikan palayanan dan menyebarluaskan pesan/informasi mengenai kebijakan dan program kerja kepada masyarakat. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang aktif.

1.5 *Job Description*

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan pada setiap Sub Bagiannya masing-masing.

1. Kepala Dinas

   Tugas pokok kepala dinas antara lain sebagai berikut :

   - Merumuskan kebijakan dan sasaran pembangunan serta pengembangan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
   - Merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

- Mengarahkan kegiatan pengelolaan data dan pencatatan mutasi kendaraan.
- Mengarahkan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Menyusun standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.
- Mengarahkan cabang pelayanan daerah dan sistem pusat informasi.

2. Sekretariat Dinas

Tugas pokok Sekretariat Dinas antara lain sebagai berikut :

- Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- Mengkoordinasi segala kegiatan antara bidang dalam lingkup dinas.
- Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas
- Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas.
- Mengkoordinasikan atau menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

A. Sekretariat Dinas membawahi 4 (empat) sub bagian, yaitu :
   - Sub Bagian Kepegawaian.
   - Sub Bagian Keuangan.
   - Sub Bagian Umum
   - Sub Bagian Perlengkapan

B. Bidang Pendapatan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :
   - Seksi Penyusunan Program.
   - Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
   - Seksi Sistem Informasi.

C. Bidang Pajak membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :
   - Seksi Penetapan dan Piutang Pajak
   - Seksi Sengketa Pajak
   - Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak

D. Bidang Non Pajak membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :
   - Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain.
   - Seksi Dana Pertimbangan.
   - Seksi Dana Pembukuan dan Pelapor Non Pajak.

E. Bidang Pengedalian dan Pembinaan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
   - Seksi Pengendalian.
   - Seksi Pembinaan.
   - Seksi Evaluasi.

1.6 Sarana dan Prasarana

Penulis didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan, dimana penulis menggunakannya untuk menunjang pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.

Tabel 1.1

Sarana Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	MASJID	1	Baik
2.	Mushola	1	Baik
3.	Aula	1	Baik
4.	Ruang Rapat	2	Baik
5.	Lift Gedung	2	Baik
6.	Ruang Tunggu	3	Baik
7.	Front Office	1	Baik
8.	Tempat Parkir	2	Baik
9.	ATM Bank Jabar	1	Baik
10.	Tangga Darurat	1	Baik
11.	Kantin	1	Baik
12.	Mesin Foto Copy	3	Baik
13.	Gudang	1	Baik
14.	Ruang Securty	2	Baik
15.	Toilet	10	Baik

Sumber : Catatan Penulis, 2013

Tabel 1.2

Sarana Kantor di Bagian Hubungan Masyarakat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Meja Kerja	10	Baik
2.	Komputer	8	Baik
3.	TV	1	Baik
4.	Lemari	4	Baik
5.	Rak Buku	2	Baik
6.	Laptop	2	Baik
7.	Kursi Kerja	10	Baik
8	Printer	2	Baik
9	Kursi Kerja	10	Baik
10	Telepon	1	Baik
11	Mesik tik	2	Baik
12	White Board	1	Baik
13	Brangkas	1	Baik
14	Jam Dinding	2	Baik
15	Bagan Struktur	1	Baik

Sumber : Catatan Penulis, 2013

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan di laksanakan di Bagian Hubungan Masyarakat Pada Dinas pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 528 Bandung – Jawa Barat.

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek dilaksanakan selama 15 Hari kerja, terhitung mulai dari tanggal 15 Juli 2013**.**

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan terhitung dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 02 Agustus 2013. Dengan waktu kerja dari hari Senin hingga Jumat mulai pukul 07.00 - 14.00 WIB.